

Selasa, 26 Juli 2011

 **Fraksi GSB**

Berikan Perhatian Pada Kerugian Daerah

Fraksi Gerindra Sejahtera Baru (GSB) melalui juru bicaranya Bachwi, MT menyoroti berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang banyak diangkat fraksi ini adalah per-

soalan kerugian daerah dan saran bagaimana mengatasinya. Berikut petikannya.

Melalui kesempatan Penyampaian Pandangan Umum

...Ke Halaman -11

Berikan Perhatian Pada Kerugian Daerah

atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010, Fraksi Gerindra Sejahtera Baru memberi beberapa Catatan untuk dilakukan penyempurnaan:

1. Sebagai evaluasi laju pertumbuhan Asset Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat seharusnya dapat dilaporkan sebagai perbandingan, total asset tahun 2010 sebesar Rp.2.799.828.736.237,97 (Dua trilyun-Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan milyar-Delapan ratus dua puluh delapan juta-Tujuh ratus tiga puluh enam ribu-Dua ratus tiga puluh tujuh puluh Sembilan puluh tujuh sen) dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu mencermati target realisasi untuk meningkatkan kualitas opini hasil audit Tim

Pemeriksaan BPK dari WDP menjadi WTP, agar bukan sekedar wacana.

3. Penyelesaian Kerugian Daerah

Dengan sisa waktu priode RPJMD pemerintahan yang ada saat ini, berbagai kasus kerugian daerah pada Pemerinatah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat dituntaskan.

* Tercatat Kerugian Telah Ada Penetapan sebesar Rp.42.204.673,- (Empat puluh dua milyar-Dua ratus empat ribu-Enam Ratus Tujuh puluh tiga rupiah). Total satu kasus

* Dalam Proses Penetapan sebesar Rp.44.057.610.521.07 (Empat puluh empat milyar-Lima puluh tujuh juta- Enam ratus sepuluh ribu-Limaratus dua puluh satu rupiah-tujuh sen). Total 18 kasus

* Masih Berupa Informasi

sebesar Rp.115.365.413.779.09 (Seratus lima belas milyar-Tiga ratus enam puluh lima juta-Empat ratus tiga belas ribu-Tujuh ratus tujuh Sembilan rupiah-Sembilan sen) dan \$ 11.709.282,89 (Sebelas juta-Tujuh ratus Sembilan ribu-Dua ratus delapan puluh dua koma Delapan puluh Sembilan - Yu ES Dollar). Total 159 kasus.

4. Hasil Pemantauan

Menunjukkan lemahnya pemahaman perangkat daerah dalam proses dokumentasi dalam hal pertanggungjawaban dalam penggunaan dana APBD, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan BPK-RI, Keputusan Gubernur.

5. Segera menindaklanjuti 4 butir Rekomendasi BPK RI:

1. Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran 2009, Nomor:12.C/HP/XIX.PNK/06/2010 tanggal 11 Juni 2010.

2. Menugaskan Majelis Pertimbangan TP/TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah yang telah terjadi khususnya TP sesuai dengan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, dan segera menyampaikan hasilnya kepada BPK RI.

3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan TP/TGR dan Sekretariatnya.

4. Mengajukan Rancangan Perda tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP dan TGR kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat.